

**PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MISKIN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN CILACAP**
(Studi Kasus di Desa Cibeunying dan Desa Limbangan)

Oleh :

Tobirin, Warsidi, Abdul Rohman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed dan Fakultas Ekonomi Unsoed

ABSTRAK

Pemberdayaan sebagai strategi pembangunan bukanlah sekedar mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek fisik atau penyaluran subsidi, melainkan sebagai gerakan mengubah, memobilisasi lingkungan menjadi kondusif guna terciptanya masyarakat mandiri. Melalui pemberdayaan masyarakat di dorong menjadi lebih aktif, inisiatif dan kreatif dalam pembangunan pedesaan. Program pemberdayaan yang telah dilakukan di Desa Cibeunying dan Desa Limbangan belum mampu memberdayakan masyarakat apalagi meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat masih dihadapkan pada lemahnya kelembagaan desa, rendahnya pendapatan, kapasitas sumberdaya yang rendah, rendahnya pendidikan, terisolirnya wilayah tersebut dari pusat kota. Penelitian ini akan mengidentifikasi, memetakan dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis pada kearifal lokal. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan dan memahami tentang pemberdayaan masyarakat desa miskin berbasis kearifan lokal secara mendalam. Dilihat dari *need assessment* masyarakat desa masih dihadapkan pada pemberdayaan yang formal tanpa pemahaman kebutuhan nyata dari masyarakat. Padahal potensi ekonomi dan sumberdaya lokal mendukung untuk pengembangan masyarakat. Strategi pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan sinergisitas berbagai pihak dalam proses perwujudan kemandirian masyarakat, tanpa kolaborasi berbagai pihak pemberdayaan tidak akan berhasil.

Kata Kunci : kemandirian, pemberdayaan, potensi lokal,

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan dianggap memiliki arti strategis dan relevan dalam proses perubahan dan perwujudan kemandirian masyarakat. Alasan yang mendasar adalah wilayah Indonesia sebagian penduduknya yang mencapai 75 % tinggal didesa, serta menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Wilayah pedesaan ini pula yang dianggap dalam kondisi terbelakang, hal ini ditandai oleh *malnutrition*, tingkat pendidikan yang rendah dan penghasilan yang hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari (Suara Merdeka, 11/4/2011).

Pembangunan harus lebih mengedepankan strategi pemberdayaan, membangun masyarakat tidak hanya mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi, tetapi juga gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan sehingga menjadi lebih kondusif bagi terciptanya masyarakat mandiri yang lepas dari berbagai bentuk eksploitasi (Usman, 2010). Melalui pemberdayaan akan terbangun perspektif yang lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*) (Yansen T.P, dkk, 2010).

Strategi pemberdayaan telah teraplikasi pada program pemberdayaan seperti, IDT, PNPM-MD, Gerbang Dema, Balik Desa Mbangun Desa, dan Bangga Mbangun Desa. Secara umum program tersebut menunjukkan kekurangoptimalannya dalam pemberdayaan masyarakat. Program Bali Ndesa Mbangun Desa di nilai tidak optimal, pertumbuhan sektor pertanian Provinsi Jateng sepanjang tahun 2010 tercatatat 2,5 %. Di bandingkan beberapa sektor lain seperti pertambangan, industri kontruksi, persewaaan dan jasa pertumbuhan sektor pertanian merupakan yang terendah (Harian Suara Merdeka, 7/4/ 2011).

Halnya pemberdayaan di Desa Cibeunying dan Desa Limongan selama ini belum mampu memecahkan permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Terdapat permasalahan diantaranya adalah; 1) perangkat desa masih dianggap belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 2) lembaga kemasyarakatan tidak nampak kegiatannya, 3) kegiatan kelompok tani belum maksimal cenderung vakum, 4) PKK/Dasawisma kegiatannya belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, 5) lembaga keagamaan tidak dapat berperan dalam perubahan desa, 6) rusaknya infrastuktur jalan desa dan tingkat pendapatan yang rendah (RPJM Desa 2010-2015)

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini ternyata belum mampu merubah kondisi yang ada di Desa Cibeunying dan Desa Limongan. Padahal di wilayah tersebut terdapat potensi lokal yang perlu dikembangkan, dari aspek ekonomi adalah potensi tanaman Kapulaga yang berlimpah serta hasil perkebunan lainnya seperti Karet dan Nira. Sisi lain potensi

lembaga keagamaannya masih dianggap penting dalam masyarakat desa dan semangat gotong-royongnya masih terjaga. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pengembangan model pemberdayaan masyarakat desa miskin berbasis kearifan lokal di desa tersebut.

Adapun dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ; maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; Bagaimanakah Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Miskin Berbasis Kearifan Lokal di Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Menurut Danim (2002) pada pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan dan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota, dan catatan lain-lain. Atas alasan itulah dipilihnya pendekatan kualitatif-deskriptif.

Fokus penelitian ini meliputi hal berikut; 1) *Need Assesment*, hal ini meliputi kondisi awal kelompok sasaran di wilayah penelitian, berupa populasi fakir miskin, kondisi fakir miskin, berbagai kebijakan dan program pemberdayaan, 2) Kajian Potensi ekonomi berkaitan dengan kondisi pasar, modal dan partnership, 3) Penguatan kelembagaan Desa, peningkatan kapasitas organisasi, aparatur pemerintah dan kelompok swadaya masyarakat, 4) Potensi Lokal, aspek budaya dan sumberdaya lokal yang dikembangkan, 5) Pengembangan model pemberdayaan masyarakat desa miskin berbasis kearifan lokal.

Sesuai dengan data yang dibutuhkan beserta sumber data tersebut, untuk mengumpulkan data dan informasi yang mendukung penelitian ini akan digunakan berbagai macam teknik, yaitu : a) Teknik Wawancara, b) Observasi, c). Studi dokumentasi, d) Focus Group Discussion (FGD)

Sesuai dengan prinsip kualitatif maka yang digunakan adalah tahapan pengolahan data, pengorganisasian data dan tahap penemuan, kemudian teknik yang digunakan dalam teknis pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada teknik triangulasi dalam penelitian ini digunakan berdasarkan sumbernya (Moleong, 2007).

KAJIAN PUSTAKA

a. Strategi Pembangunan dan Arah Pemberdayaan

Paradigma pembangunan dari sudut para ahli terbagi dalam hal berikut, yaitu: (a) strategi pertumbuhan; tujuan pembangunan dalam paradigma ini adalah pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai melalui proses industrialisasi. Penanganan terhadap kemiskinan diasumsikan akan dapat dilakukan secara otomatis melalui mekanisme rembesan ke bawah (*trickle down effect*) apabila industri telah berkembang; (b) strategi pemenuhan kebutuhan pokok; kritikan terhadap pertumbuhan yang mengakibatkan ketidakmerataan atau ketimpangan, baik secara geografis maupun secara demografis. Strategi yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin; (c) strategi pembangunan yang berpusat pada manusia, menekankan arti pentingnya peran manusia, menghargai perbedaan dan mencoba mengelola sumberdaya berdasarkan potensi lokal (Moeljarto Tjokrowinoto dalam Ratminto 2007)

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual, aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Strategi pemberdayaan terdiri dari empat indikator, yaitu para pelaku pembangunan, baik sektor negara maupun sektor masyarakat, memperoleh keadilan dan kesetaraan dalam hal akses, partisipasi kontrol, dan manfaat dari dan terhadap pembangunan. (Nugroho, 2003 : 29)

Tabel 1. Peta Pemberdayaan Masyarakat Desa

A	NEGARA	Pemerintah Demokrasi Desa. Good Governance. Otonomi Desa, Peningkatan kapasitas perangkat Desa dan reformasi Birokrasi	Pembangunan Pembangunan dari bawah. Pengentasan Kemiskinan. Penyediaan akses masyarakat pada layanan publik (pendidikan, kesehatan dan perumahan)
O	MASYARAKAT DESA	Pengembangan partisipasi politik (voice, akses, control dan kemitraan) Pemberdayaan Masyarakat Politik Bapadam Perwakilan Desa	Partisipasi Masyarakat. Penguatan Modal Sosial dan Institusi Lokal. Pemberdayaan Civil Society

Sumber: Diadaptasi dari Eko (2005), Reformasi Politik dan Pemerdayaan

Masyarakat,

b. Pembangunan Berbasis Kemandirian Desa dan Kemiskinan

Pada saat ini pembangunan masyarakat desa masih relevan sebagai kajian kontemporer, hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, perkembangan kota sampai saat ini yang disebabkan oleh industrialisasi secara massif, namun desa masih bertahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi arah dan sifat perkembangan kota. Kedua, berbagai macam kebijakan dan program pembangunan pedesaan yang ditandai oleh inovasi teknologi modern, secara umum kondisi sosial ekonomi masih memprihatinkan. Ketiga, sejumlah studi menunjukkan jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak (Usman, 2010:29-30).

Pembangunan pedesaan seharusnya berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, yaitu; adanya keterlibatan stakeholders, karena setiap pihak memiliki sumberdaya dan peran yang biasa didayagunakan secara proposisional sekaligus mengubur paradigma lama yang berasumsi bahwa pemerintah berperan sebagai pemasok atau penyedia, dan digantikan dengan peran fasilitator serta pemberdaya masyarakat (Rosada, 2008).

Namun faktanya terjadi hal yang berbeda, berbagai program pengentasan kemiskinan seperti IDT, Program Pengembangan Kecamatan, JPS telah terimplementasikan oleh pemerintah, utamanya dengan desa sebagai muaranya.

Alasannya fenomena kemiskinan mudah ditemukan di wilayah pedesaan (Asley dan Maxwell, 2001; 395; McCulloch, et all, 2007: 1) Namun demikian Problem kemiskinan di pedesaan belum dapat diatasi oleh program-program tersebut. Laju kemiskinan di wilayah pedesaan menunjukkan lonjakan yang drastis (Rosyadi dan tobirin, 2010). Bahkan beberapa peniliti mensyinyalir telah terjadi proses pemiskinan masyarakat pedesaan di Indonesia (Sujarwo dan Yumarni, 2007:7) Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada Bulan Maret 2009, 63,38 persen penduduk miskin berada di daerah pedesaan, sedangkan pada Maret 2010 sebensar 64,23 persen (Berita Resmi Statistik BPS No.45/07/Th.XIII, 1 Juli 2010).

Teezzi, Marchettini, dan Rosini (2005) mengatakan bahwa dalam masyarakat kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari yang tidak terpisahkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menelaah permasalahan dan menganalisis berbagai program pemberdayaan sebagai langkah alternatif dalam pemecahan masalah kemiskinan atau tingkat kesejahteraan di desa guna mencapai masyarakat mandiri. Adapun telaah penelitian ini meliputi hal berikut :

1. Need Asssessment/Analisis Situasi

Masyarakat Desa Cibeunying dan Desa Limbangan memiliki karakteristik sebagai desa yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Tolak ukur dari rendahnya tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut ; 1) Permasalahan infrastuktur yang hancur dan tidak terjangkau oleh kendaraan umum mengakibatkan mobilisasi yang kurang dinamis serta

terputusnya jalur ekonomi masyarakat setempat, 2) masih tingginya rawan pangan, di beberapa dusun kekurangan air bersih dan air untuk pertanian, pada puncak musim kemarau dan musim hujan, hasil panen merosot atau gagal panen, 3) kurangnya kesadaran akan hidup bersih dan sehat, 4) Kesadaran akan pentingnya pendidikan di usia dini sangat kurang, karena akses pendidikan dirasa sangat mahal dan jauh dari lokasi tempat tinggal, hal ini membuat masyarakat enggan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sarana dan prasarana pendidikan di dusun pun masih sangat minim. Hanya ada SD, Pesantren dan PAUD, hal tersebut dapat diketahui dari segi fasilitas kurang memadai, 5) Minimnya akses informasi dunia luar di dusun cihueleut, membuat warga sering kali tertinggal. Ilmu pengetahuan secara teoritis ataupun informasi actual juga dirasa minim. Tidak ada sarana untuk menggali kreatifitas para warga untuk berkembang. 6) Kelembagaan Desa yang masih lemah hal ini tercermin pada, perangkat desa masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Melihat peta permasalahan yang ada berbagai program pemberdayaan telah diimplementasikan. Terlihat jelas berbagai program yang ditujukan pada kelompok sasaran yaitu rumah tangga miskin (RTM) termasuk PNPM Mandiri perdesaan yang diorientasikan pada pembangunan infrastruktur dan perbaikan kehidupan 810 RTM. Upaya ini dilakukan dengan perbaikan jalan desa sekitar 89 % dari jalan desa yang hancur, upaya perbaikan pengetahuan masyarakat melalui perbaikan kualitas hidup dengan peningkatan ketrampilan pertukangan dan menjahit. Perbaikan lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui program Bibit untuk rakyat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, mampu mewujudkan pembibitan 30 ribu tanaman alba, 15 ribu jabon dan 5 ribu tanaman pete. Selain itu program Bangga Mbangun Desa yang meliputi empat pilar pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi. Program pemberdayaan Bangga Mbangun Desa Bersinergi dengan pengusaha lokal melalui pengembangan pendidikan PAUD dan lembaga pendidikan pesantren dan pendirian tempat ibadah.

Pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan rakyat juga dilakukan dengan inovasi pengembangan sereh sebagai hasil perkebunan yang memiliki

ekonomis tinggi. Hasil kerjakeras dari warga desa mampu memberdayakan 27 orang dalam wadah kelompok tani melalui kerjasama pengusaha lokal dan masyarakat setempat dengan mengusahakan tanah seluas 46 ha. Proses ini mampu merubah kondisi masyarakat yang stagnan menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif untuk memberdayakan dirinya sendiri menjadi masyarakat mandiri. Tingkat partisipasi dan swadaya yang tinggi menjadi tolak ukur keberhasilan dari berbagai program tersebut.

2. Potensi Ekonomi sebagai potensi lokal

Potensi ekonomi di masyarakat setempat terlihat dari potensi dusun tersebut yang memiliki potensi sumber daya local yang cukup potensial yaitu gula merah, perikanan rakyat, kapulaga, tanaman sereh sebagai bahan baku minyak sereh untuk alat kosmetik, perkebunan rakyat kayu Alba serta hasil perkebunan lainnya. Gula merah sebagai kegiatan ekonomi rakyat menjadi tradisi ekonomi yang belum terkelola dengan baik. Hampir setiap warganya mengusahakan gula merah, setiap warga memiliki 15 pohon kelapa untuk menghasilkan gula merah 3 kg setiap harinya. Usaha gula merah ini dilakukan secara tradisional dan hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari warga masyarakat.

Hasil perkebunan yang potensial adalah kayu Alba dan Jabon yang dikembangkan masyarakat. Usaha ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan lainnya. Namun usaha ini terhambat dengan harga yang cukup murah karena sulitnya infrastruktur yang hancur dan kondisi perbukitan yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum. Potensi lain yang dikembangkan warga sebagai hasil inovasi warga adalah tanaman sereh dan kapulaga. Tanaman sereh sebagai tanaman ekonomis tinggi belum dikembangkan secara optimal. Warga masyarakat di Dusun Ciheuleut baru mengusahakan 10 ha dari 46 hektar yang direncanakan untuk pengembangannya. Kapulaga sebagai tanaman yang mudah diusahakan oleh warga karena mudah tumbuh dan kondisi alam yang mendukung menyebabkan tanaman kapulaga itu menjadi tanaman rakyat. Harga yang cukup menjanjikan 80 ribu per kg menjadi daya tarik, usaha ini juga terhambat dengan system pemasaran yang tradisional dan hanya

mengandalkan pasar tradisional dan para tengkulak. Berbagai potensi ekonomi tersebut menjadi modal untuk pengembangan usaha masyarakat. Namun Potensi yang dimiliki belum mampu merubah masyarakat dari kehidupan yang stagnan. Program pemberdayaan yang dilakukan bersifat parsial dan tidak terkoordinair dengan baik. Tidak adanya komitmen bersama dalam pemberdayaan masyarakat untuk lebih progressive dan berkelanjutan.

3. Penguatan Kelembagaan Desa

Masalah yang masih dihadapi masyarakat desa dari aspek kelembagaan, 1) Pemdes & BPD, Perangkat desa masih dianggap belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 2) Lembaga Kemasyarakatan, Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagian besar tidak memiliki kegiatan, 3) Kelompok Tani kegiatan kelompok tani belum maksimal cenderung vakum, 4) Kegiatan PKK/Dasawisma kegiatannya belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, 5) Puskesmas pembantu, kegiatan pelayanan kepada masyarakat dirasakan masih kurang karena keterbatasan waktu pelayanan.

Permasalahan lemahnya kelembagaan desa ini berakibat pada rendahnya peran dan partisipasi aparat desa dalam mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Secara kelembagaan memiliki arti strategis yang menyangkut tiga hal, yaitu siapa pihak yang telibat (baik individual ataupun *social group*), bagaimana tata hubungan di antara mereka (aspek struktur), dan bagaimana aturan main di antara mereka (aspek kultur). Aspek kultural dan struktural merupakan dua komponen utama dalam setiap kelembagaan. Kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian dan pedesaan selama ini. Namun demikian, pengembangan kelembagaan belum pernah mencapai hasil yang optimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama karena pemahaman dan strategi yang kurang tepat. (Sahyuti, 2003). Aparat pelaksana pemberdayaan perlu diberdayakan melalui pendampingan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Terutama pengembangan kapasitas kepemimpinan, pengelolaan keuangan serta kemampuan perencanaan dan inisiasi kegiatan. Aparat desa dan lembaga desa masih melakukan kegiatan yang terbatas

pada kegiatan rutinitas dan kurang mendukung pada perbaikan dan perubahan masyarakat.

4. Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Miskin

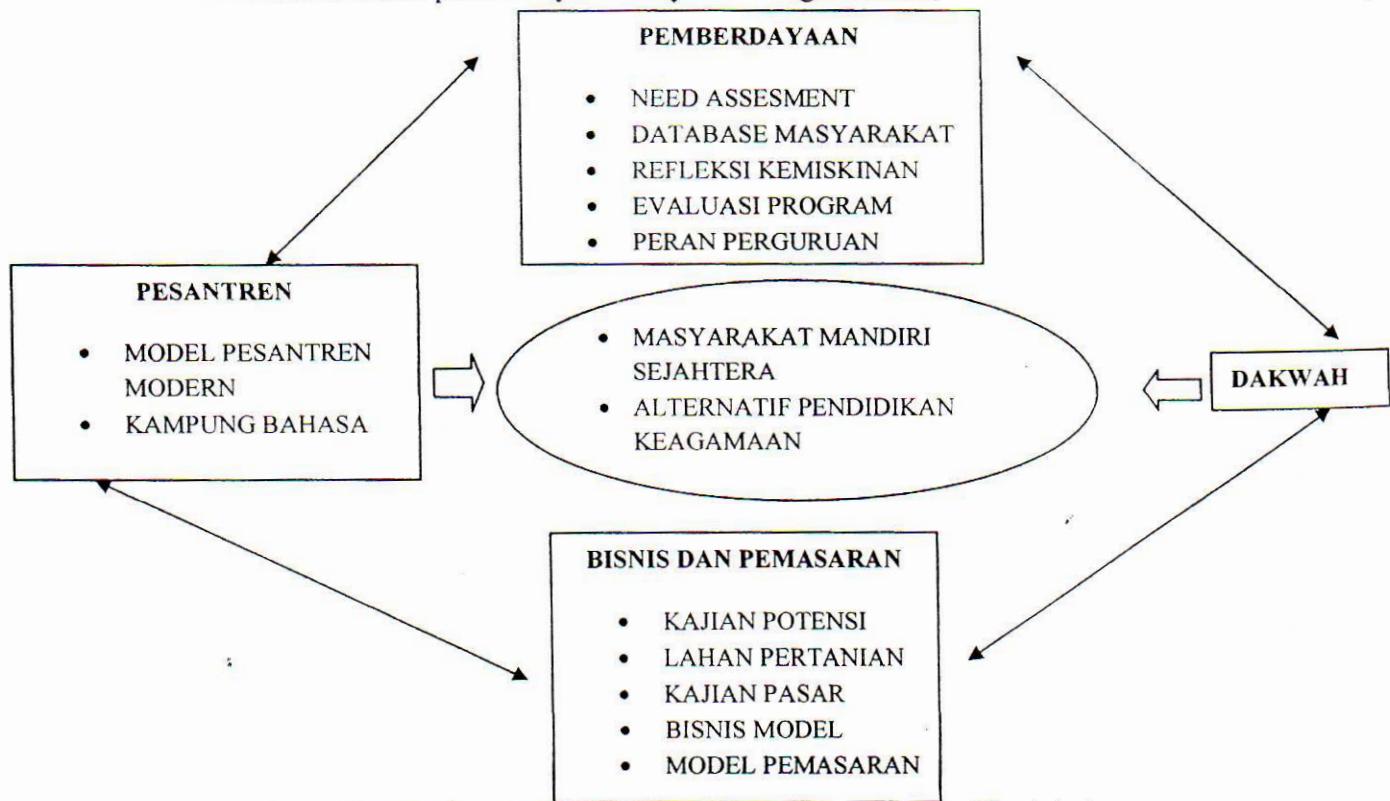
Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata "daya", yaitu kekuatan atau kemampuan (Sulistiyani, 2004). Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan dan atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari berbagai pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum memiliki daya. Dalam istilah konsep pemberdayaan atau "empowerment" dianggap sebagai alternatif pembangunan yang intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Fokusnya adalah lokalitas sebab civil society akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal (Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007).

Pendapat dari Eko (2002) menyebutkan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma kebijakan pembangunan terjadi dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan desa terpadu pada tahun 1970-an, beralih menjadi pembangunan masyarakat desa pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, beralih menjadi pemberdayaan masyarakat desa mulai akhir 1990-an hingga sekarang. Paradigma pembangunan lebih berorientasi pada Negara dan modal sementara paradigm pemberdayaan lebih berfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif.

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan menjadi pilihan strategis untuk mempercepat kemandirian masyarakat. Demikian halnya di Desa Cibeunying dan Limbangan Kabupaten Cilacap Berbagai program pemberdayaan menjadi kata kunci untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan diantaranya adalah PNPM Mandiri Perdesaan, Bangga Mbangun Desa, Program Bibit Rakyat, program Dinas Pertanian berupa drainase telah memberikan perbaikan bagi kehidupan masyarakat setempat. Terutama dari aspek pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, sebagai upaya

membuka lokasi desa yang terhambat geografis yang kurang mendukung dalam perkembangan masyarakat. Selain itu pengembangan masyarakat juga didukung oleh peran serta masyarakat lokal dengan pemberdayaan yang mengedepankan potensi lokal. Salah satunya adalah pengembangan potensi ekonomi berupa tanaman sereh dan jenis tanaman lain seperti kapulaga dan gula kelapa yang mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.

Sinergitas peran pengusaha untuk memberdayakan masyarakat. Munculnya Inovator pemberdayaan masyarakat desa dengan pemanfaatan Tanah milik Pengusaha di Purbalingga seluas 46 ha. Upaya menggerakkan masyarakat dan operasionalisasi ekonomi melalui pemanfaatan lahan dengan proses yang panjang sampai terbentuknya sistem ekonomi di dusun tersebut dengan terperdayakannya 27 orang petani. Dimulai dari pengorganisasi kelompok tani, usaha produktif tanaman sereh dengan proses penyulingan sendiri sampai penjualan. Berbagai pandangan dan temuan lapangan hasil penelitian dapat dirumuskan model pemberdayaan masyarakat sebagai berikut;



Gambar 1. Pengembangan model pemberdayaan berbasis kearifan lokal

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Proses pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi lokal mampu meninspirasi dan memotivasi masyarakat dalam berswadaya membangun desanya. Hal ini terbukti dengan tingkat swadaya masyarakat yang cukup tinggi dalam membangun infrastruktur desa dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat tersadarkan untuk memiliki desanya dan dinggap sebagai keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat. 2) Pemberdayaan masyarakat di lakukan tidak hanya oleh lembaga pemerintah, melainkan lembaga-lembaga lokal termasuk masyarakat setempat yang memiliki modal untuk mengembangkan desanya. Sinergitas pemberdayaan masyarakat akan berarti apabila terjadi masing-masing lembaga berperan dengan baik. 3) Tipologi pemerintah desa yang berbeda antara desa satu dengan yang lainnya menjadi kendala dari berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di Desa Cibeunying aparat desa yang transparan dan responsive mampu bersinergi untuk membangun desanya melalui berbagai program pembangunan. Sementara Desa Limongan masih dihadapkan pada aparat desa yang kurang responsive terhadap berbagai program pembangunan, akibatnya timbul permasalahan 4) Pengembangan model pemberdayaan masyarakat desa miskin dikembangkan dari aspek struktur, infrastuktur serta tingkat partisipasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ashley, Caroline dan Simon Maxwell, 2001 Rethinking Rural Development Policy Review, Vol. 19, No.4:395-425
- Eko, Sutoro, 2005, Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, APMD Press, Yogyakarta Sumodiningrat, Gunawan, 2007, Pemberdayaan Sosial Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Pangarsa, Galih Widjil, 2007, Pemberdayaan SDM Berwawasan Kearifan Lokal Menuju Lingkungan Binaan Berkelanjutan, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.VII No.1 September 2006 – Februari 2007, FIA Brawijaya, Malang.

Purwanto, Erwan Agus, 2007, Revitalisasi pembangunan Pedesaan Melalui Penguanan Industri Kecil, Interaksi Jurnal Politik dan Manajemen Publik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisip UGM Volume II, Nomor 1 Maret 2007

Ratminto, 2007, Refleksi Kritis atas Orientasi dan Pendekatan Pembangunan di Jaman Orde Baru, Interaksi Jurnal Politik dan Manajemen Publik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisip UGM Volume II, Nomor 1 Maret 2007

Ridwan, Nurma Ali, 2007, Landasan keilmuan Kearifan Lokal, Jurnal Ibda' Vol. 5 No. 1 Jan-Jun 2007 27-38, STAIN Purwokerto

Rosada, Dada, 2008, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus: Kota Bandung Dengan Tujuh Program Prioritas Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktik Administrasi, Volume 5/Nomer 4/ Halaman 307-426/Desember 2008.

Saharuddin, 2009, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal, Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol 3.No. 1

Sujarwoto dan Tri Yumarni, 2007. Desa Rawan Pangan: Kritik Terhadap Kebijakan pangan Nasional Dalam Kontek Pembangunan Pedesaan Indonesia. Jurnal Administrasi Publik. Vol VII. No. 2.FIA-Universitas Brawijaya, Malang

Tiezzi, E., Marchettini, T. & Rossini, M. TT. 2005, *Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community*. <http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp>.

Yansen, T.P, dkk, 2010, Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal Di Wilayah perbatasan Studi Tentang Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Dema) di Desa Nawang Baru Kecamatan kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal Spirit Publik, Vol 6, No. 2, Oktober 2010

Sumber lain :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2010-201

Harian Suara Merdeka, 7 April 2011 Semarang Jawa Tengah

Harian Suara Merdeka, 11 April 2011 Semarang jawa Tengah